

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

Nama, tahun	Ananta Dimaz, 2008	Iñnatul Mazidah, 2009	Windy Puspitasari, 2011
Judul	Pengaruh mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> dan motivasi Kerja terhadap Praktik manajemen Laba. (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)	Pengaruh Penerapan Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan. (Studi kasus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan. (Studi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2009)
Metpen	Kuantitatif	Kuantitatif	Kuantitatif
Hasil penelitian	Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, motivasi rencana bonus berpengaruh tidak signifikan terhadap praktik manajemen laba.	Kepemilikan manajerial, keberadaan komite audit dan kepemilikan institusional tidak mampu menjadi mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> dalam membatasi manajemen Laba. Hanya Komisaris independen yang mampu menjadi mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> dalam membatasi	Variabel-variabel kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional secara simultan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2009.

		manajemen laba.	
--	--	-----------------	--

Sumber: data diolah (2015)

B. Tinjauan Teori

1. *Good Corporate Governance*

a. Definisi *Good Corporate Governance* (GCG)

Secara umum *Good Corporate Governance* dapat diartikan sebagai sistem tata kelola perusahaan yang baik, namun banyak definisi berbeda mengenai *Good Corporate Governance* yang dikemukakan oleh berbagai pihak, antara lain: Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktek GCG pada BUMN menyebutkan :

Good Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. (KepMen BUMN, 2002:3)

Tim GCG Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2008) mendefinisikan *Good Corporate Governance*, yaitu: "*Good corporate governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan". *Corporate Governance Perception Index 2013* (CGPI) menyebutkan, *Good Corporate Governance* adalah struktur, sistem, dan proses

yang digunakan oleh organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah kepada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* berdasarkan norma, etika, budaya, dan aturan yang berlaku. (IICG, 2013:2)

Internation Finance Corporation (IFC) (2014) menyebutkan :

“Corporate governance refers to the structures and processes for the direction and control of companies. Corporate governance concerns the relationships among the management, Board of Directors, controlling shareholders, minority shareholders and other stakeholders. Good corporate governance contributes to sustainable economic development by enhancing the performance of companies and increasing their access to outside capital.” (IFC, 2014:1)

Tata kelola perusahaan mengacu pada struktur dan proses untuk pengarahan dan pengendalian perusahaan. Tata kelola perusahaan peduli terhadap hubungan dalam manajemen, dewan direksi, pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas, dan pemangku kepentingan yang lain. Tata kelola perusahaan yang baik berkontribusi pada perkembangan ekonomi yang berkesinambungan dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan akses mereka ke modal luar.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, *Good Corporate Governance* secara umum merupakan :

1. Suatu sistem yang mengacu pada struktur dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan untuk tujuan pengarahan dan pengendalian perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder*.
2. Struktur yang memperhatikan hubungan antara manajemen, dewan direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lain dalam rangka menciptakan perkembangan perekonomian perusahaan yang berkesinambungan.

b. Prinsip-prinsip Dasar *Good Corporate Governance*

Dalam penerapan GCG terdapat prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dan setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam setiap kegiatan perusahaan agar struktur dan proses GCG dapat berjalan dengan baik. Terdapat lima prinsip GCG yang dijadikan pedoman perusahaan untuk menjalankan setiap kegiatannya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency*, dan *Fairness*. Prinsip-prinsip ini dijelaskan didalam Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011, yaitu:

1. *Transparency* (Keterbukaan)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Keterbukaan informasi perusahaan dapat membantu investor maupun *stakeholder* lainnya dalam mengambil keputusan dan mempertimbangkan resiko. Keterbukaan perusahaan dalam menyediakan informasi bagi masyarakat akan memberikan dampak yang positif bagi perusahaan. Masyarakat yang mampu menilai kinerja perusahaan akan memberikan kepercayaan terhadap suatu perusahaan apabila perusahaan menyajikan informasi yang menunjukkan catatan kinerja perusahaan yang baik.

Pedoman pokok pelaksanaan keterbukaan telah ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada tahun 2006, yaitu :

1. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
4. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Prinsip ini

menunjukkan adanya pelaksanaan dan pembatasan kekuasaan yang jelas yang dibebankan dalam suatu fungsi dan setiap fungsi wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan segala kegiatannya kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya. Penerapan prinsip akuntabilitas harus dikelola dengan tetap memperhatikan kepentingan *shareholder* dan *stakeholder* agar perkembangan ekonomi perusahaan yang berkesinambungan dapat tercapai.

Pedoman pokok pelaksanaan akuntabilitas yang telah ditetapkan oleh KNKG (2006), yaitu :

1. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.
2. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
3. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
4. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).

5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

3. *Responsibility* (Bertanggung Jawab)

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Bentuk tanggung jawab perusahaan adalah kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Penerapan prinsip bertanggung jawab dimaksudkan untuk menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasional, perusahaan mempunyai tanggung jawab kepada *stakeholder*.

Pedoman pokok pelaksanaan prinsip tanggung jawab menurut KNKG (2006) adalah sebagai berikut :

1. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).
2. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4. *Independency* (Kemandirian)

Keadaan di mana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip ini menggambarkan perusahaan yang dikelola dengan baik sehingga dapat bertanggung jawab atas kegiatannya dan menghindari benturan dari pihak luar yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prinsip ini memberikan tanggung jawab kepada setiap fungsi di dalam perusahaan untuk mampu mengelola perusahaan secara mandiri dan tanpa campur tangan pihak lain.

Pedoman pokok pelaksanaan prinsip kemandirian yang telah ditetapkan KNKG (2006) adalah sebagai berikut :

1. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
2. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

5. *Fairness* (Kewajaran)

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Penerapan prinsip kewajaran dan kesetaraan ini menuntut perusahaan untuk berlaku adil dalam memenuhi hak

stakeholder sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penerapan prinsip ini diharapkan dapat mengurangi konflik yang mungkin dapat terjadi.

Pedoman pokok pelaksanaan prinsip kewajaran yang telah ditetapkan oleh KNKG (2006) adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
2. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
3. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara domestik tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

c. Manfaat *Good Corporate Governance*

Ada lima manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* menurut Tadikapury (2011), yaitu :

- 1) GCG secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan domestik yang lebih efektif dan efisien, yang pada

gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.

- 2) GCG dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dalam hal ini menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional.
- 3) Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.
- 4) Membangun manajemen dan *Corporate Board* dalam pemantauan penggunaan *asset* perusahaan.
- 5) Mengurangi korupsi.

Manfaat *good corporate governance* yang lain juga dikemukakan oleh Dwiridotjahjono (2008:296):

“Secara teoritis, praktik *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan secara umum meningkatkan kepercayaan investor.”

d. Tahap – tahap pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Penerapan *good corporate governance* di perusahaan, adalah penting bagi para pelaku bisnis. untuk melakukan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan dan tingkat kesiapan perusahaan untuk melakukan pentahapan penerapan *good corporate governance* yang cermat. Ada tiga tahapan dalam

penerapan *good corporate governance* yang dikemukakan oleh Kaihatu (2006), yaitu:

1) Tahap Persiapan

Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama:

(1) Awareness Building

Meminta bantuan tenaga ahli dari luar perusahaan dengan cara mengadakan kegiatan seminar atau diskusi kelompok dengan tujuan membangun kesadaran mengenai arti GCG dan komitmen dalam penerapannya.

(2) GCG Assesment

Setelah membangun kesadaran bersama akan pentingnya penerapan GCG, tahap berikutnya adalah mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian terlebih dahulu guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG.

(3) GCG manual building

Langkah ini adalah penyusunan manual atau pedoman implementasi GCG, setelah *GCG Assesment* dilakukan. Penyusunan pedoman didasari pada hasil pemetaan yang dilakukan pada *GCG assessment*.

2) Tahap Implementasi

Setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama yakni:

(1) Sosialisasi

Perkenalan aspek-aspek dalam perusahaan yang berkaitan dengan implementasi GCG khususnya mengenai pedoman implementasi GCG. Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan satu tim khusus di bawah pengawasan direktur.

(2) Implementasi

Kegiatan yang dilakukan berdasarkan pedoman dan *roadmap* yang telah disusun. Implementasi hendaknya mencakup seluruh elemen perusahaan termasuk dewan komisaris dan direksi. Implementasi GCG merupakan awal proses perubahan dalam perusahaan, maka dari itu hendaknya perusahaan mengupayakan manajemen perubahan.

(3) Internalisasi

Penerapan GCG didalam seluruh kegiatan dan peraturan perusahaan. Upaya ini dapat memastikan bahwa penerapan GCG bukan sekedar dipermukaan tetapi benar-benar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan.

3) Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan *scoring* atas praktik GCG yang ada. Evaluasi dapat membantu perusahaan memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi GCG sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan (Kaihatu, 2006:2-3).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa ketiga tahapan tersebut sangat dibutuhkan dalam penerapan GCG perusahaan. Tahapan-tahapan diatas juga memberikan pengetahuan bagi seluruh anggota perusahaan untuk menerapkan konsep GCG dan menciptakan budaya GCG pada perusahaan. Apabila ketiga tahapan dijalankan dengan baik oleh perusahaan, dipercaya bukan hanya penerapan GCG yang akan tercipta tetapi juga akan melahirkan budaya GCG dalam perusahaan. Hal ini sangat penting untuk mendukung perbaikan-perbaikan di dalam perusahaan dan perkembangan perusahaan secara berkesinambungan.

e. Mekanisme *Good Corporate Governance*

Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan control/pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme *governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi (Walsh dan Seward, 1990).

Bernhart dan Rosentei menyatakan beberapa mekanisme *corporate governance (corporate governance mechanism)* seperti mekanisme internal yang meliputi struktur dan dewan komisaris dan mekanisme eksternal yang terdiri dari pasar untuk kontrol perusahaan diharapkan dapat mengatasi masalah keagenan. Konflik keagenan yang mengakibatkan adanya sifat oportunistik manajemen akan mengakibatkan rendahnya kualitas laba. Rendahnya kualitas laba akan dapat membuat kesalahan pembuatan keputusan bagi para pengguna informasi yakni *stakeholder* yang akan mengakibatkan berkurangnya nilai perusahaan di mata mereka (Bernhart dan Rosentein dalam Mazidah, 2009:1).

Adapun mekanisme *good corporate governance* diantaranya adalah:

1. Kepemilikan manajerial

Berdasarkan sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Dua hal tersebut akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Secara umum dapat dikatakan bahwa presentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba (Boediono dalam Ujiyantho dan Pramuka, 2007:7).

Adanya peningkatan kepemilikan saham oleh manajer, diharapkan manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan para *principal* karena manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manjerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan kepentingan antara manajemen dengan *stakeholder*. Perusahaan dengan kepemilikan saham yang besar seharusnya memiliki konflik keagenan yang rendah. Jansen dan Meckling menyatakan bahwa untuk meminimalkan konflik keagenan adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial di dalam perusahaan (Scott,2000:8). Semakin besar kepemilikan manajemen semakin kecil kecenderungan untuk melakukan manajemen laba karena adanya kesejajaran kepentingan dan tujuan (mazidah, 2009:52).

2. Dewan Komisaris Independen

Kemampuan dewan komisaris untuk mengawasi merupakan fungsi yang positif dari porsi dan independen dari dewan komisaris eksternal. Dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Menurut Egon Zehnder, "Dewan komisaris merupakan inti dari *Corporate Governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas" (Egon Zehnder International dalam FCGI, 2010:12-13). Intinya dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Mengingat manajemen yang bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen maka dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000. Peraturan ini menyatakan bahwa perusahaan yang *listed* di Bursa harus mempunyai komisaris independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas (bukan *controlling shareholders*). Persyaratan jumlah minimal komisaris independen dalam peraturan ini adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris (Surya, 2006:136)

Karakteristik dewan komisaris secara umum dan khususnya komposisi dewan dapat menjadi suatu mekanisme yang menentukan

tindakan manajemen laba. Melalui peranan dewan dalam melalui peranan dewan dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap operasional perusahaan yang dijalankan oleh pihak manajemen, komposisi dewan komisaris dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap tercapainya proses penyusunan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris yang terdiri dari anggota yang berasal dari luar perusahaan mempunyai kecenderungan mempengaruhi manajemen laba perusahaan.

3. Komite *Audit*

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, komite *audit* adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite *audit* sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite *audit* dibentuk oleh dewan komisaris/dewan pengawas, yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite *audit* bersifat mandiri baik dalam pelaksanaannya maupun dalam pelaporannya dan bertanggung jawab langsung kepada komisaris. Berdasarkan Surat Edaran dari Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001, keanggotaan komite *audit* sekurang-kurangnya tiga orang termasuk komite *audit*. Anggota komite *audit* ini berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite *audit* ini berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan. Anggota lain harus berasal dari pihak eksternal yang independen (Surya dan Yustia Vandana, 2006:145-147).

Umumnya komite *audit* mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:

1) Laporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Komite *audit* bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang

sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang.

2) Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tanggung jawab komite *audit* dalam bidang *corporate governance* adalah untuk memastikan, bahwa perusahaan telah ijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

3) Pengawasan perusahaan (*Corporate Control*)

Komite *audit* bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaannya termasuk di dalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal (Surya dan Yustiavandana, 2006:148).

Menurut Kep-29/PM/2004 tugas komite *audit* antara lain:

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
- 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.

- 3) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
- 4) Melaporkan kepada komisaris berbagai resiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh direksi.
- 5) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.
- 6) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan (Surya, 2006:149)

4. Kepemilikan Institusional

Efektifitas pengelolaan sumber daya perusahaan dapat diketahui oleh manajemen dari informasi yang dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Boediono, 2005:3)

Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Cai *et al* menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan. Cornet *et al* menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri (Surya dan Yustiavandana, 2006:134)

f. Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi terfokus pada dua individu yaitu *principal* (pemilik modal) dan *agent* (manajer). Prinsipal mendelegasikan *responsibility desicion making* kepada agen. Baik prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai orang-orang ekonomi yang rasional yang semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadi, tapi mereka kesulitan membedakan penghargaan atas preferensi, kepercayaan dan informasi. Hak dan kewajiban dari prinsipal dan agen dijelaskan dalam sebuah perjanjian kerja yang saling menguntungkan (Raharjo 2007:38).

Aplikasi *agency theory* dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, *return* maupun resiko-resiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Kontrak kerja akan menjadi optimal bila kontrak dapat *fairness* yaitu mampu menyeimbangkan antara prinsipal dan agen yang secara matematis memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen dan pemberian insentif/imbalance khusus yang memuaskan dari prinsipal ke agen. Inti dari teori keagenan adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan (Arifah 2012:87)

Teori agensi menunjukkan adanya ruang kemungkinan terjadinya konflik antara prinsipal dan agen berdasarkan kepentingan kedua pihak yang berbeda (*conflict of interest*). Masalah utama yang biasanya timbul adalah: kontrol prinsipal kepada agen, biaya yang menyertai hubungan agensi, dan minimalisasi biaya agensi. Agen memiliki pengetahuan yang lebih banyak akan kondisi perusahaan dibandingkan prinsipal maka dari itu dalam rangka peningkatan kontrol dan pengawasan prinsipal terhadap kinerja agen dan

keadaan perusahaan serta meminimalisir konflik agensi prinsipal perlu mengeluarkan biaya agensi. Biaya agensi yang biasanya muncul adalah :

- 1) Pengeluaran untuk monitoring seperti biaya untuk pemeriksaan akuntansi dan prosedur pengendalian intern.
- 2) Pengeluaran insentif sebagai kompensasi manajemen atas prestasi yang konsisten dalam memaksimalkan nilai perusahaan.
- 3) *Fidelity bond* adalah kontrak antara perusahaan dengan pihak ketiga di mana pihak ketiga *bonding company* setuju untuk membayar perusahaan jika manajer berbuat tidak jujur sehingga menimbulkan kerugian perusahaan. (Muntahanah, 2012:6)

Berdasarkan *conflict of interest* antara prinsipal dan agen yang dapat menimbulkan biaya agensi maka diperlukan suatu tata kelola perusahaan yang baik. *Good corporate governance* disini berfungsi sebagai sistem yang dapat meminimalisir terjadinya *conflict of interest* antara agen dan prinsipal sehingga dapat menekan biaya agensi yang muncul. Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* sangat penting dalam rangka menjembatani hubungan antara prinsipal dan agen.

2. Manajemen Laba

a. Pengertian manajemen Laba

Menurut Scott, *earnings management is the choice by a manager of accounting policies so as to achieve some specific objective* (scott,2000:351).

Pengertian tersebut menunjukkan manajemen laba sebagai suatu tindak oportunitis manajer, sehingga dapat *manage earning* pada tingkat yang diinginkan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat lain dengan cara tertentu yang kurang baik seperti tindakan curang dapat didefinisikan sebagai tindakan untuk menipu orang lain yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kekayaan atas kesalahan pengambilan keputusan yang dilakukannya.

Copeland (1968 :10) dalam Utami (2005) mendefinisikan manajemen laba sebagai, “*some ability to increase or decrease reported net income at will*”. Ini berarti bahwa manajemen laba mencakup usaha manajemen untuk memaksimalkan atau meminimumkan laba, termasuk perataan laba sesuai dengan keinginan manajer.

Schipper (1989: 92) mengartikan manajemen laba dari sudut pandang fungsi pelaporan pada pihak eksternal, sebagai *disclosure management*, dalam pengertian bahwa manajemen melakukan intervensi terhadap proses pelaporan keuangan kepada pihak eksternal dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Manajemen laba merupakan campur tangan manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan yang tujuannya untuk dilaporkan kepada pihak eksternal dengan tujuan tertentu.

b. Bentuk-bentuk Manajemen Laba

Pernyataan Scoot mengenai bentuk-bentuk manajemen laba tersebut dapat didefinisikan peneliti sebagai berikut:

a. Taking Bath

Hal ini dapat terjadi selama periode adanya masalah dalam organisasi termasuk perekrutan pemimpin baru dalam perusahaan. Jika sebuah perusahaan melaporkan adanya sebuah masalah/kerugian, manajemen harus terpaksa dalam melaporkan sebuah kerugian besar.

b. Income minimization

Hal ini sedikit mirip dengan *taking a bath*, tetapi tidak begitu ekstrim. Polanya mungkin dapat dibentuk oleh perusahaan yang tampak secara politik selama masa profitabilitas tinggi. Kebijakan yang menyarankan minimalisasi pendapatan termasuk adanya penghapusan yang cepat atas aset-aset capital dan aktiva tak kentara, pengeluaran iklan dan juga pengeluaran riset dan pembangunan, akuntansi yang sukses atas biaya eksplorasi minyak dan gas, dan seterusnya.

c. Income maximization

Seperti yang dapat dilihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Healy (2003), manajer mungkin dapat terlibat dalam sebuah pola atas memaksimalkan laporan pendapatan bersih untuk tujuan bonus, menyiapkan hal-hal tersebut tidak membuat masalah ini selesai.

Perusahaan yang hampir mendekati pelanggaran perjanjian hutang dapat juga memaksimalkan pendapatan.

d. Income smoothing

Hal ini mungkin menjadi pola manajemen pendapatan yang paling menarik. Dapat dilihat dari penelitian Healy (2003), manajer memiliki sebuah insentif untuk melancarkan pendapatan secukupnya yang dimana hal ini dapat tersisa diantaranya. Maka pendapatan yang dipertujukan untuk bonus akan hilang secara sementara atau bahkan permanen. Terlebih lagi, jika manajer enggan terhadap resiko, mereka akan memilih variable yang memiliki aliran bonus yang kurang, yang akhirnya dapat melanjutkan pendapatan bersih.

Beberapa manajemen laba yang dapat dilakukan oleh manajer sebagaimana diungkapkan oleh Scott adalah sebagai berikut (Scott,2002:365):

a. Taking Bath

This can take place during periods of organization stress or reorganization, including the hiring of a new CEO. If a firm must report a loss, management may feel compelled to report a large one-it has little to lose at this point.

b. Income minimization

This is similar to taking bath, but less extreme. Such a pattern may be chosen by apolitically visible firm during periods of high profitability. Policies that suggest income minimization include rapid writeoffs of capital assets and intangibles, expensing of advertising and R&D expenditures, successful-efforts accounting for oil and gas exploration costs, and so on.

c. Income maximization

As we saw in Healy's study, managers may engage in a pattern of maximization of reported net income for bonus purposes, providing this does not put them above the cap. Firms that are close to debt covenant violations may also maximize income.

d. Income smoothing

This is perhaps the most interesting earnings management pattern. We saw from Healy that managers have an incentive to smooth income sufficiently that it remains between the bogey and cap. Otherwise, earnings may be temporarily or permanently lost for bonus purposes. Furthermore, if managers are risk-averse they will prefer a less variable bonus stream, and hence may want to smooth net income.

c. Pemicu Manajemen Laba

Pernyataan Scott mengenai pemicu manajemen laba dapat didefinisikan peneliti sebagai berikut:

a. Bonus Plant Hypothesis

Manajer atas sebuah perusahaan dengan perencanaan bonus akan lebih suka untuk memilih prosedur akuntansi yang merubah laporan pendapatan dari periode akan datang pada periode saat ini. Hipotesis ini tampaknya beralasan. Manajer perusahaan, seperti orang-orang pada umumnya, akan menginginkan gaji yang tinggi. Jika gaji mereka berdasarkan, paling tidak sebagian, pada bonus yang terhubung pada laporan pendapatan bersih. Lalu mereka akan dapat meningkatkan bonus mereka saat ini dengan melaporkan pendapatan bersih setinggi mungkin.

b. The debt Covenant Hypothesis

Semakin dekat sebuah perusahaan pada pelanggaran perjanjian hutang berbasis akuntansi, manajer perusahaan akan semakin memilih prosedur akuntansi yang merubah laporan pendapatan dari periode mendatang menuju periode saat ini. Alasannya karena meningkatkan laporan pendapatan bersih akan mengurangi probabilitas kesalahan teknis.

c. The political cost Hypothesis

Semakin besar adanya pengeluaran politik yang dihadapi oleh sebuah perusahaan, maka manajer akan lebih memilih prosedur akuntansi yang merubah laporan pendapatan dari periode mendatang menuju periode saat ini. Hipotesis pengeluaran politik mengenalkan pada sebuah dimensi politik menuju pemilihan kebijakan perhitungan akuntansi. Sebagai contoh, pengeluaran politik dapat dibebankan dengan probabilitas yang tinggi, yang mungkin dapat menarik perhatian media dan konsumen. Perhatian tersebut dapat dengan cepat diartikan sebagai ópanasô politik dalam perusahaan dan politisi mungkin merespon dengan adanya pajak baru atau peraturan yang lain.

Ada tiga pemicu dalam positif *accounting theory* yang melatarbelakangi terjadinya manajemen laba, yaitu:

a. Bonus Plant Hypothesis

All other things being equal, managers of firms with bonuses plans are more likely choose accounting procedures that shift reported earnings from future periods to the current period. This hypothesis seems reasonable. Firm managers, like everyone else, would like high remuneration. If their remuneration depends, at least in part, on a bonus

related to reported net income. Then they may be able to increase their current bonus by reporting as high a net income as possible.

b. The debt Covenant Hypothesis

All other things being equal, the closer firm is to violation of accounting-based debt covenants, the more likely the firm manager is to select accounting procedures that shift reported earnings from future periods to the current period. The reasoning is that increasing reported net income will reduce the probability of technical default.

c. The political cost Hypothesis

All other things being equal, the greater the political cost faced by a firm, the more likely the manager is to choose accounting procedures that defer reported earnings from current to future periods. The political cost hypothesis introduces a political dimension into accounting policy choice. For example, political cost can be imposed by high profitability, which may attract media and consumer attention. Such attention can quickly translate into political “heat” on the firm and politicians may respond with the new taxes or other regulations (Scott, 2002:266).

D. Teknik Manajemen Laba

Manajemen laba dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu (Scott, 2003):

1. Mengubah metode akuntansi

Bentuk manajemen laba ini dapat diketahui dengan mudah karena perubahan metode akuntansi harus disebutkan dalam laporan keuangan. Selain itu, adanya standar konsistensi yang mencegah seringnya terjadi perubahan metode akuntansi.

2. Mengendalikan berbagai akrual untuk menetapkan angka akuntansi

Akrual adalah semua kejadian yang bersifat operasional pada suatu tahun yang berpengaruh terhadap arus kas. Empat jenis akrual yang mempengaruhi laba adalah perubahan piutang, perubahan hutang, perubahan persediaan, dan perubahan biaya depresi. Akuntan memperhitungkan akrual untuk menandingkan beban dengan pendapatan melalui perkakuan transaksi yang berkaitan dengan laba bersih.

E. Model Pendeteksi Manajemen Laba

Secara Umum ada tiga cara yang telah dihasilkan para peneliti untuk mendeteksi manajemen laba, yaitu:

1. Model Berbasis *Aggregate Accrual*

Model berbasis *aggregate accrual* yaitu model yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas rekayasa dengan menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Healy (1985), De Angelo (1986), dan Jones (1991). Selanjutnya Dechow, Sloan, dan Sweeney (1995) mengembangkan model Jones menjadi model Jones yang dimodifikasi (*modified Jones Model*). Model-model ini menggunakan total akrual dan model regresi untuk menghitung akrual yang diharapkan (*expected*

accruals) dan akrual yang tidak diharapkan (*unexpected accruals*) (Sulistyanto, 2008).

a. Model Healy (1985)

Model Healy (1985) merupakan model yang relatif sederhana karena menggunakan total akrual (*total accruals*) sebagai proksi manajemen laba. Alasan penggunaan total akrual adalah sebagai berikut:

- Total akrual memiliki potensi untuk mengungkap cara-cara manajemen laba baik itu menaikkan maupun menurunkan laba.
- Total akrual mencerminkan keputusan manajemen, yaitu untuk menghapus aset, pengakuan atau penundaan pendapatan dan menganggap biaya atau modal suatu pengeluaran.

Model Healy (1985):

$$TA_{it} = (\Delta Ca_{it} - \Delta Cl_{it} - \Delta Cash_{it} - \Delta STD_{it} - Dep_{it}) / (A_{it} - 1)$$

Keterangan :

TA_{it} : Total akrual perusahaan i pada periode t

ΔCa_{it} : Perubahan dalam aktiva lancar perusahaan i pada periode ke t

ΔCl_{it} : Perubahan dalam hutang lancar perusahaan i pada periode ke t

$\Delta Cash_{it}$: Perubahan dalam kas dan ekuivalen kas perusahaan i pada

periode ke t

ΔSTD_{it} : Perubahan dalam hutang jangka panjang yang termasuk

dalam hutang lancar perusahaan i pada periode ke t

Depit : Biaya depresiasi dan amortisasi perusahaan i pada periode ke

t

A_{it-1} : Total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1

b. Model De Angelo (1986)

De Angelo (1986) mengasumsikan bahwa tingkat akrual yang *nondiscretionary* mengikuti pola *random walk*. Dengan demikian tingkat akrual yang *nondiscretionary* perusahaan i pada periode t diasumsikan sama dengan tingkat akrual yang *nondiscretionary* pada periode ke t-1. Jadi, selisih total akrual antara periode t dan t-1 merupakan tingkat akrual *discretionary*. Dalam model ini, De Angelo menggunakan total akrual t-1 sebagai akrual *nondiscretionary*.

Model De Angelo (1986):

$$DA_{it} = (TA_{it} - TA_{it-1}) / A_{it-1}$$

Keterangan :

DA_{it} : *Discretionary accruals* perusahaan i pada periode ke t

TA_{it} : *Total accruals* perusahaan i pada periode ke t

TA_{it-1} : *Total accruals* perusahaan i pada periode ke t-1

A_{it-1} : Total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1

c. Model Jones (1991)

Dalam penelitian Jones menggunakan dasar model Healy (1985). Jones mengembangkan model untuk memisahkan *discretionary accruals* dari *nondiscretionary accruals*. Nilai dari *discretionary accruals* dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DA_{it} = TA_{it}/A_{it-1} - [\hat{U}_1(1/A_{it-1}) + \hat{U}_2(\Delta REV_{it}/A_{it-1}) + \hat{U}_3(PPE_{it}/A_{it-1})] + \hat{U}$$

Keterangan:

DA_{it} : *Discretionary accruals* perusahaan i pada periode t

TA_{it} : *Total accruals* perusahaan i pada periode t

A_{it-1} : Total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1

ΔREV_{it} : Perubahan *revenue* perusahaan i pada periode ke t

PPE_{it} : Aktiva tetap perusahaan i pada periode ke t

$\hat{U}$: Error term

d. Model Friedlan (1994)

Model Friedlan merupakan pengembangan model Healy (1985) dan model De Angelo (1986). Perhitungan *discretionary accruals* menurut model Friedlan adalah sebagai berikut:

$$DAC_{pt} = (TAC_{pt} / SALE_{pt}) - (TAC_{pd} / SALE_{pd})$$

Keterangan :

DAC_{pt} : *Discretionary accruals* pada periode tes

TAC_{pt} : *Total accruals* pada periode tes

TAC_{pd} : *Total accruals* pada periode dasar

$SALE_{pt}$: Penjualan pada periode tes

SALE_{pd} : Penjualan pada periode dasar

e. Model Modifikasi Jones

Dechow dkk (1995) menguji berbagai alternatif model akrual dan mereka menyatakan bahwa model modifikasi Jones adalah model yang paling baik untuk menguji manajemen laba. Model modifikasi Jones adalah sebagai berikut:

$$DA_{it} = TA_{it}/A_{it-1} - [\hat{U}_1(1/A_{it-1}) + \hat{U}_2(\mu REV_{it} - \mu REC_{it}/A_{it-1}) + \hat{U}_3(PPE_{it}/A_{it-1}) + \hat{U}_4]$$

Keterangan :

μREC_{it} : Perubahan piutang dagang perusahaan i pada periode t

2. Model Berbasis *Specific Accruals*

Model yang berbasis akrual khusus (*specific accruals*), yaitu pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item atau komponen laporan keuangan tertentu dari industri tertentu, misalnya piutang tak tertagih dari sektor industri tertentu atau cadangan kerugian piutang dari industri asuransi (Sulistyanto, 2008).

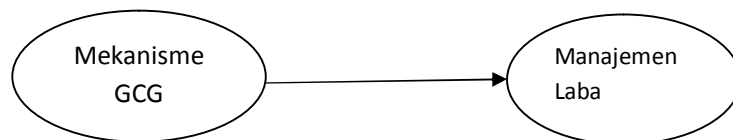
3. Model Berbasis *Distribution of Earnings After Management*

Model *distribution of earnings* dikembangkan oleh Burgtähler dan Dichev, Degeorge, Patel, dan Zeckhauser, serta Myers dan Skinner. Pendekatan ini dikembangkan dengan melakukan pengujian secara statistik terhadap komponen-komponen laba untuk mendeteksi faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan laba. Model ini terfokus

pada pergerakan laba disekitar *benchmark* yang dipakai, misalkan laba kuartal sebelumnya, untuk menguji apakah *incidence* jumlah yang berada di atas maupun di bawah *benchmark* telah didistribusikan secara merata, atau merefleksikan ketidakberlanjutan kewajiban untuk menjalankan kebijakan yang telah dibuat . (Sulistyanto, 2008)

C. Model konsep

Suatu penelitian model konsepsi dapat menggambarkan suatu fenomena dengan jelas dan mudah dimengerti mengenai sesuatu yang akan diteliti. Konsep mengekspresikan suatu abstraksi yang terbentuk melalui generalisasi dari pengamatan terhadap fenomena-fenomena. Konsep dibuat untuk menggolongkan dan mengelompokkan obyek-obyek atau peristiwa-peristiwa yang memiliki cirri-ciri yang sama.



Gambar 1 Model Konsep

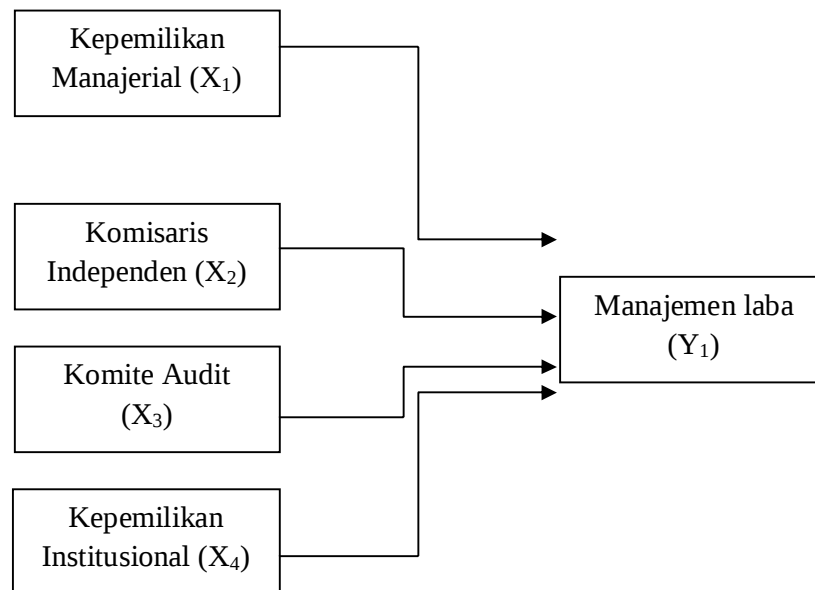
Sumber: Data diolah 2015

Hubungan diatas dapat dijelaskan bahwa dengan mengadakan analisis terhadap variable mekanisme GCG dapat mempengaruhi manajemen laba. Mekanisme *good corporate governance* (GCG) diharapkan dapat meningkatkan proses pengawasan terhadap manajemen sehingga mencegah terjadinya praktik manajemen laba yang dapat berpengaruh pada kinerja

keuangan perusahaan. Ada tiga sasaran yang dapat diterapkan oleh manajer dalam melakukan manajemen laba meliputi : meminimalisasi biaya politik, maksimalisasi kesejahteraan manajer dan minimalisasi kas pendanaan, oleh karena itu konsep *good corporate governance* (GCG) diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memonitor kinerja perusahaan dan untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* yang sesuai dengan investasi yang telah ditanamkannya.

D. Model Hipotesis

Berdasarkan acuan pengembangan model konsep yang dilanjutkan pada sebuah model hipotesis, maka model hipotesis pada penelitian ini dilihat pada Gambar 2



Gambar 2 Model Hipotesis

Sumber: Data diolah 2015

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2008:93).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini akan diuji hipotesis :

H1: Diduga terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba

H2: Diduga terdapat pengaruh komisaris independen terhadap manajemen laba

H3 : Diduga terdapat pengaruh komite audit terhadap manajemen labaa

H4: Diduga terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba